

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kepri adalah sebagai berikut :

1. Rendahnya kualitas dan kuantitas SDM dalam menjalankan tupoksi, lemahnya koordinasi antar bagian, serta penempatan SDM yang kurang sesuai dengan keahliannya.
2. Sarana dan prasarana yang masih belum memadai. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana belum memiliki gedung yang representatif dalam penyelenggaraan pelayanan, Gedung P2TP2A, selter, maupun rumah aman bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.
3. Belum tersedianya basis data akurat terkait dengan data terpilah atau data responsif gender dan anak untuk dipergunakan dalam perencanaan pengaggara yaitu Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG);
4. Aksesibilitas perempuan dalam pengelolaan sumberdaya ekonomi terbatas. DP3AP2KB telah melakukan kemitraan dengan Bank Indonesia dan beberapa Bank Swasta di Kepri, namun implementasi atas kemitraan tersebut belum optimal dilaksanakan. Hal ini disebabkan karena jarak antara Kabupaten/Kota ke pusat pemerintahan provinsi sulit dijangkau khususnya yang berada di Kepulauan Anambas, Natuna, Lingga dan Karimun.
5. Rendahnya kontribusi pendapatan perempuan. Sumbangan kontribusi perempuan tahun 2014 hanya sebesar 26,8 %, sedangkan laki-laki 73,2%. Pengeluaran Laki-laki sebesar Rp 18.679.000 dan perempuan hanya Rp 11.625.000 selama tahun 2014.
6. Belum optimalnya jejaring lembaga pengelola keberdayaan perempuan dan anak. Hingga tahun 2015 telah terbentuk Pokja PUG dan Focal Point Pokja PUG di 7 Kabupaten/Kota dan Provinsi. Forum PPRG sudah terbentuk di

Provisi dengan lingkup Kabupaten/Kota. Sedangkan Forum PUG dan Forum Data pilah belum terbentuk.

7. Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kekerasan terhadap perempuan tahun 2015 sebesar 831 orang, tertinggi adalah kekerasan dalam rumah tangga yaitu sebesar 67 %. Sedangkan kekerasan pada anak sebanyak 154 anak. Dari sejumlah kekerasan yang terjadi 58 % merupakan kekerasan terhadap anak dengan perlindungan khusus.
8. Kepri menjadi daerah tujuan dan transit korban tindak kekerasan dan perdagangan orang dari seluruh wilayah Indonesia. Beberapa pelabuhan “tikus” adalah pintu masuk dalam perdagangan manusia. Pelabuhan tersebut adalah :
 - a. Kota Batam melalui Teluk Mata Ikan Kec. Batu Besar dan Nongsa Kec. Nongsa ;
 - b. Kota Tanjungpinang melalui Tanjung Unggat Kec. Bukit Bestari Pelabuhan Dompok Kecamatan Bukit Bestari dan Pelabuhan Batu Enam Kec. Tanjungpinang Timur;
 - c. Kabupaten Bintan melalui Galang Batang Kec. Teluk Bintan ,Sungai Kecil Kec.Teluk Sebong dan Pantai Sakera Kec. Teluk Sebong;
 - d. Kabupaten Karimun melalui P. Karimun Anak Kec. Tebing danTanjung Sebatak Kec. Tebing
9. Tingkat perceraian tinggi yaitu sebanyak tiga ribu pasangan yang melakukan perceraian dalam 5 tahun. Alasan terbesar yaitu 80 % adalah perselingkuhan, dan 20 % akibat faktor ekonomi dan ketidakharmonisan.
10. Banyaknya pintu masuk perdagangan orang (*trafficking*) sehingga menyulitkan pengendalian. Pintu masuk perdagangan orang melalui pelabuhan-pelabuhan kecil (rakyat) termasuk pelabuhan resmi. Beberapa jalur yang digunakan melalui Pelabuhan Internasional Sri Bintan Pura Kota Tanjungpinang, Pelabuhan Internasional Batam Center Kota Batam, Pelabuhan Tanjung Balai Karimun di Kabupaten Karimun dan Pelabuhan Tanjung Uban di Kabupaten Bintan.
11. Menurunnya ketahanan keluarga dalam menciptakan keluarga sejahtera dan harmonis.

12. Tingginya pernikahan dini dan pernikahan anak yang tidak diinginkan. Pada tahun 2015 jumlah kasus pernikahan dini dan pernikahan anak yang tidak diinginkan mencapai 1.980 anak.
13. Belum optimalnya perlindungan khusus bagi anak-anak. Fasilitas bagi anak-anak berkebutuhan khusus di Provinsi Kepulauan Riau masih terbatas.
14. Rendahnya motivasi dan partisipasi perempuan dalam mengembangkan potensi dan berkiprah dalam ranah publik khususnya dalam bidang ekonomi, politik, sosial dan hukum
15. Rendahnya kontribusi dunia usaha/swasta dalam penerapan PUG , dan pemenuhan hak anak. Provinsi Kepulauan Riau memiliki potensi CSR yang cukup besar, namun pengelolaannya belum optimal. Saat ini CSR yang di salurkan bagi penerapan PUG dan Pemenuhan Hak Anak masih sangat terbatas.
16. Terbatasnya serta belum optimalnya lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan dan anak. Telah ada beberapa lembaga di Kota Batam, Kota Tanjung pinang seperti Forum Anak, P2TP2A, LPTC, LPSA, UPPA, KPPAD, Tepak Siring, PPT Rumah Sakit, Taman Penitipan Anak, beberapa LSM seperti berpelangi, Kasih Puan, Kompak. Akan tetapi lembaga-lembaga tersebut belum optimal menjalankan tugas. sangat minim terhadap kelembagaan tersebut.
17. Masih bervariasi kelembagaan sebagai wujud dukungan Pemerintah Kabupaten/Kota terhadap program Kependudukan dan Keluarga Berencana (belum adanya kabupaten kota yang membentuk BKKBD)
18. Ratio jumlah Penyuluh KB terhadap jumlah Desa/Kelurahan di Kepulauan Riau yang belum ada. Kepulauan Riau memiliki 351 Desa/Kelurahan sedangkan jumlah PLKB/PKB sebanyak 547 yang berarti setiap petugas lapangan KB rata-rata membina 4 Desa/Kelurahan.
19. Belum sinergisnya penyerasian kebijakan-kebijakan dibidang pengendalian penduduk yang ditandai masih belum konsistennya secara vertikal maupun horizontal kebijakan kependudukan terkait dengan kuantitas, kualitas dan mobilitas penduduk. Ini ditandai pula adanya kebijakan yang kurang mendukung upaya pengendalian kuantitas atau jumlah penduduk

20. Belum optimalnya pelaksanaan program Keluarga Berencana, dilihat dari masih rendahnya cakupan peserta KB aktif. Peserta KB aktif tahun 2015 sebesar 46,11%.
21. Tingginya migrasi penduduk.
22. Belum optimalnya kemampuan penyediaan alat kontrasepsi. Permintaan ber-KB yang Terpenuhi (Demand Satisfaction) tahun 2015 sebesar 65,72%.
23. Masih tingginya angka unmet need KB tahun 2015 sebesar 24,05%.
24. Masih banyaknya Jumlah PUS yang isterinya dibawah usia 20 tahun. Age Specific Fertility Rate (ASFR) adalah banyaknya kelahiran tiap seribu wanita pada kelompok umur tertentu. ASFR 15-19 tahun 21,76%.
25. Sementara beberapa kabupaten yang terpencil,

B. Telaah Visi, Misi dan Kebijakan Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih

1. Visi

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah menetapkan Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2015-2020 yang merupakan penjabaran dari Visi, yaitu sebagai berikut:

**“TERWUJUDNYA KEPULAUAN RIAU SEBAGAI BUNDA TANAH
MELAYU YANG YANG SEJAHTERA, BERAKHLAK MULIA, RAMAH
LINGKUNGAN DAN UNGGUL DI BIDANG MARITIM”.**

2. Misi

Secara umum, Misi Provinsi Kepulauan Riau dapat diartikan sebagai suatu hal yang harus dilaksanakan agar Visi Provinsi Kepri dapat direalisasikan dengan baik. Berdasarkan pada rumusan Visi Provinsi Kepri, maka misi yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, aparatur birokrasi yang profesional, disiplin dengan etos kerja tinggi serta penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas.
2. Mengembangkan perikehidupan masyarakat yang agamis, demokratis, berkeadilan, tertib, rukun dan aman di bawah payung budaya Melayu.

3. Meningkatkan kualitas pendidikan, ketrampilan dan profesionalisme Sumber Daya Manusia sehingga memiliki daya saing tinggi.
4. *Meningkatkan derajat kesehatan, kesetaraan gender, penanganan kemiskinan dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).*
5. Meneruskan pengembangan ekonomi berbasis maritim, pariwisata, pertanian untuk mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kesenjangan antar wilayah serta meningkatkan ketahanan pangan
6. Meningkatkan iklim ekonomi kondusif bagi kegiatan penanaman modal (investasi) dan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah.
7. Meneruskan pengembangan ekonomi berbasis industri dan perdagangan dengan memanfaatkan bahan baku lokal.
8. Meningkatkan daya saing ekonomi melalui pengembangan infrastruktur berkualitas dan merata serta meningkatkan keterhubungan antar kabupaten/kota.
9. Meningkatkan daya dukung, kualitas dan kelestarian lingkungan hidup.

3. Arah Kebijakan Umum Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau

Visi dan Misi pembangunan jangka menengah setelah dijabarkan dalam tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan, maka proses selanjutnya adalah kebijakan umum dan program. Kebijakan umum pada hakekatnya merupakan resume dari semua arah kebijakan pembangunan yang dipilih, sementara program merupakan penjabaran dari arah kebijakan yang terkait langsung dengan pelaksanaan visi dan misi RPJMD. Rumusan kebijakan umum pembangunan dapat dilihat dari empat perspektif, yaitu perspektif masyarakat atau layanan, perspektif proses internal, perspektif kelembagaan, dan perspektif keuangan. Kebijakan umum pembangunan jangka menengah Provinsi Kepulauan Riau terutama diarahkan pada:

1. Pembangunan bidang maritim khususnya dalam peningkatan daya saing produk dan jasa maritim (kelautan dan pariwisata bahari).

2. Percepatan pembangunan infrastruktur yang memadai dan peningkatan konektivitas wilayah dan antar pulau untuk pertumbuhan dan pemerataan.
3. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
4. Peningkatan penanggulangan kemiskinan melalui berbagai program yang terpadu, sinergis dan berkelanjutan.
5. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan rakyat.
6. Pengurangan pengangguran dengan menciptakan lapangan kerja dan mendorong investasi berskala nasional di Provinsi Kepulauan Riau.
7. Peningkatan pembangunan yang responsif gender, ramah anak, dan ramah lansia/penyandang disabilitas.
8. Peningkatan pengendalian penduduk dengan optimalisasi pelaksanaan program Keluarga Berencana.
9. Peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta penanggulangan bencana.
10. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana juga mendukung arah kebijakan pembangunan yang tertuang didalam arah kebijakan pembangunan Gubernur Kepri yaitu Peningkatan pembangunan yang responsif gender, ramah anak, dan ramah lansia/penyandang disabilitas. Sedangkan kebijakan yang dirumuskan adalah Peningkatan kapasitas kelembagaan pengarusutamaan gender, peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan, serta Peningkatan upaya pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi terhadap anak, perempuan, dan kelompok marjinal.

Tabel 3.1.
Faktor Pendorong dan Penghambat Misi dan Program Gubernur Provinsi
Kepulauan Riau

No	Misi dan Program Gubernur	Permasalahan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Misi: Meningkatkan derajat kesehatan, kesetaraan gender, penanganan kemiskinan dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).			
2	Program :			
	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak.	Rendahnya kualitas dan kuantitas SDM dalam menjalankan tupoksi, lemahnya koordinasi antar bagian, penempatan SDM yang kurang sesuai dengan keahliannya serta sarana dan prasarana yang masih belum memadai	Jumlah SDM terbatas	Pimpinan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana memiliki etos kerja yang tinggi
		Belum tersedianya basis data akurat responsif gender dan anak yang digunakan dalam perencanaan penganggaran.	Data dari Kabupaten/Kota sulit diperoleh	Sekarang sistem data sedang dikerjakan.
		Belum optimalnya jejaring lembaga pengelola	Koordinasi antar lembaga masih lemah	Jumlah LSM dan Ormas yang peduli anak dan perempuan

No	Misi dan Program Gubernur	Permasalahan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		pemberdayaan perempuan dan anak.		tinggi sehingga mudah koordinasi.
	Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan	Rendahnya kapasitas, ketrampilan dan pendapatan perempuan dalam menopang kesejahteraan keluarga.	Jumlah perempuan pengagur tinggi	Program dan kegiatan untuk keberdayaan perempuan cukup bagus.
	Program Peningkatan Kualitas Perlindungan Perempuan dan Anak	Tingginya kekerasan terhadap perempuan dan anak, termasuk pernikahan dini, perdagangan orang, kerentanan anak berkebutuhan khusus dan lemahnya ketahanan keluarga.	Korban enggan melapor	Jemput bola terhadap kasus kekerasan
	Program Keluarga Berencana	Belum optimalnya kegiatan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi hak-hak dan kesehatan reproduksi	Kurangnya sosialisasi terkait hak-hak dan kesehatan reproduksi	adanya penganggaran untuk pelaksanaan program edukasi hak-hak dan kesehatan reproduksi
		Masih bervariasinya kelembagaan sebagai wujud dukungan Pemerintah Kabupaten/Kota terhadap program	tidak ada fasilitasi pembentukan kelembagaan	Program penguatan kelembagaan

No	Misi dan Program Gubernur	Permasalahan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		Kependudukan dan Keluarga Berencana (belum adanya kabupaten kota yang membentuk BKKBD)		

C. Telaah Visi dan Misi Pembangunan Nasional dan Renstra Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1. Telaah Visi dan Misi Pembangunan Nasional

Visi pembangunan nasional untuk tahun 2015-2019 adalah:

TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG-ROYONG

Upaya untuk mewujudkan visi ini adalah melalui 7 Misi Pembangunan yaitu:

- a. *Mewujudkan* keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
- b. *Mewujudkan* masyarakat maju, berkeimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum.
- c. *Mewujudkan* politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
- d. *Mewujudkan* kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.
- e. *Mewujudkan* bangsa yang berdaya saing.
- f. *Mewujudkan* Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.
- g. *Mewujudkan* masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Berkaitan dengan misi sebagaimana tersebut diatas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berkontribusi terhadap pencapaian misi ***Mewujudkan* kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera**, khususnya adalah peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak.

Untuk menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan sembilan agenda prioritas dalam pemerintahan ke depan. Kesembilan agenda prioritas itu disebut NAWA CITA.

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.
2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
9. Memperteguh kebhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Dalam Nawa Cita tersebut Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana akan merumuskan program dan kegiatan selaras dengan Nawa Cita yaitu :

1. **Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.**

Program ini akan diimplementasikan dalam program perlindungan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.

2. **Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.** Program yang akan diimplementasikan adalah meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak.
3. **Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.** Program dan kegiatan yang akan dilakukan adalah meningkatkan usaha yang digeluti perempuan agar mampu bersaing di pasar global.
4. **Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.** Program dan kegiatan yang akan dilakukan adalah meningkatkan ekonomi perempuan dalam rangka memperkuat ketahanan keluarga.

2. Tujuan, Fokus Prioritas dan Program Jangka Menengah Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2015-2019

a. Tujuan

Rumusan Tujuan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk mendukung upaya pencapaian Visi dan Misi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan;
- 2) Meningkatnya penerapan kebijakan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan;
- 3) Meningkatnya pemenuhan hak semua anak, termasuk anak dalam kondisi khusus dan perlindungan anak;
- 4) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kemen PP-PA.

b. Fokus Prioritas

Fokus prioritas untuk mencapai sasaran Kementerian PPPA adalah:

- 1) Pelaksanaan pengarusutamaan gender di bidang perekonomian, dengan fokus prioritas pada ketenagakerjaan dan usaha mikro (industri rumahan);
- 2) Pelaksanaan pengarusutamaan gender di bidang sosial, politik dan hukum dengan fokus prioritas:
 - a) Bidang sosial, fokus prioritas dilakukan dalam upaya penurunan AKI dan penurunan kasus HIV/AIDS, bahan ajar, serta adaptasi perubahan iklim;
 - b) Bidang politik, fokus prioritas melalui peningkatan keterlibatan perempuan dalam proses pengambilan keputusan dan/atau politik di legislatif, eksekutif dan yudikatif;
 - c) Bidang hukum, fokus prioritas pada pemetaan dan mereview kebijakan bias gender.
- 3) Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan, dengan fokus prioritas pada upaya pencegahan terjadinya kekerasan terhadap perempuan;
- 4) Pelaksanaan kebijakan perlindungan anak, dengan fokus prioritas pada upaya pencegahan terjadinya kekerasan terhadap anak;
- 5) Pelaksanaan kebijakan pemenuhan hak anak, dengan fokus prioritas pada upaya pemenuhan hak anak di bidang pendidikan melalui Sekolah Ramah Anak; bidang kesehatan melalui Puskesmas Ramah Anak; bidang infrastruktur melalui Ruang Bermain Ramah Anak; serta partisipasi anak dalam perencanaan pembangunan;
- 6) Perencanaan program dan anggaran serta evaluasi kinerja organisasi yang diselesaikan, dilaksanakan, dipantau dan dievaluasi tepat waktu, terintegrasi dan harmonis dengan dokumen perencanaan lainnya (RPJPN, RPJMN, Renstra);
- 7) Peningkatan ketersediaan dan pemanfaatan data dan informasi tentang gender dan anak dengan fokus prioritas pada penyusunan

profil gender dan anak, pemanfaatan data oleh satuan kerja, dan publikasi Kemen PP-PA;

- 8) Peningkatan SDM yang kompeten sesuai kebutuhan dan kualifikasi, prasarana sarana barang dan jasa, serta keuangan, dengan fokus prioritas pada peningkatan kapasitas SDM.

c. Program

Dalam rangka mencapai sasaran strategis Kemen PPPAtahun 2015-2019, maka ditetapkan 2 (dua) program teknis dan 1 (satu) program generik yaitu:

1) Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan (teknis)

Program ini bertujuan mendukung tugas dan fungsi Kemen PPPAdalam mendorong terwujudnya kebijakan yang responsif gender, termasuk kebijakan yang berorientasi pada perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan pada K/L dan Pemda. Dalam pelaksanaannya, program ini difokuskan pada perumusan kebijakan dan program yang responsif gender di bidang perekonomian, sosial, politik dan hukum serta perumusankebijakan dan program perlindungan hak-hak perempuan, dan dibarengi dengan pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap efektifitas pelaksanaan kebijakan yang telah dirumuskan.Program ini memiliki 2 (dua) sasaran yang ingin dicapai yaitu:

- a) Meningkatnya pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di berbagai bidangyang ditandai dengan :
 - (1) Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan;
 - (2) Jumlah lembaga yang melaksanakan kebijakan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan.
- b) Meningkatnya perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan, yang ditandai dengan:
 - (1) Jumlah kebijakan perlindungan perempuan;

- (2) Jumlah lembaga yang melaksanakan perlindungan perempuan;
- (3) Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif.

2) Program Perlindungan Anak (teknis)

Program ini bertujuan untuk mendukung tugas dan fungsi Kemen PPPA dalam mendorong terwujudnya kebijakan yang peduli anak, yang berorientasi pada tumbuhkembang anak, termasuk pada perlindungan anak dari berbagai tindak kekerasan pada K/L dan Pemda. Dalam pelaksanaannya, program ini difokuskan pada perumusan kebijakan dan kegiatan yang peduli anak pada berbagai bidang pembangunan, dan diiringi dengan pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap efektifitas pelaksanaan kebijakan yang telah dirumuskan. Program ini memiliki 2 (dua) sasaran yang ingin dicapai yaitu:

- a) Meningkatnya pemenuhan hak anak, termasuk tindakan afirmasi bagi anak dalam kondisi khusus, yang ditandai dengan:
 - 1) Jumlah kebijakan pemenuhan hak anak;
 - 2) Jumlah K/L, provinsi/kabupaten/kota, dan ormas yang melaksanakan kebijakan pemenuhan hak anak.
- b) Meningkatnya perlindungan khusus anak, yang ditandai dengan:
 - 1) Jumlah kebijakan perlindungan khusus anak;
 - 2) Jumlah K/L, provinsi/kabupaten/kota, dan ormas yang melaksanakan kebijakan perlindungan khusus anak;
 - 3) Persentase pengaduan kasus anak yang ditindaklanjuti.

3) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya (generik)

Program ini dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas Kemen PPPA dalam proses mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kemen PPPA.

Sasaran program yang ingin dicapai yaitu mendukung pelaksanaan tugas-tugas Kemen PPPA dalam proses mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik yang ditandai dengan:

- a) Persentase (%) rencana program dan anggaran Kemen PPPA yang diselesaikan tepat waktu, dilaksanakan, dipantau dan dievaluasi berdasarkan tersedianya data terkini, terintegrasi dan harmonis;
- b) Persentase (%) layanan sarana prasarana, keuangan dan pengembangan SDM;
- c) Persentase (%) koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum yang sesuai kebutuhan dan akuntabel.

Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepri disusun dengan memperhatikan Kebijakan Pembangunan Nasional dan Renstra Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Sasaran yang akan ditetapkan dalam Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana diselaraskan dengan pencapaian sasaran Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, sehingga nantinya akan berkontribusi terhadap pencapaian sasaran di Kementerian PPPA.

Tabel 3.2.
Permasalahan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Faktor Pendorong dan Penghambat Capaian Sasaran Renstra KPPA

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra KPPA	Permasalahan Pelayanan Dinas PPPAP2KB	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Meningkatnya pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di berbagai bidang pembangunan	Rendahnya kepedulian SKPD terhadap pencapaian KKG	Koordinasi lemah	Kabupaten/Kota mensupport Provinsi dengan berbagai kegiatan
2	Meningkatnya pemenuhan hak anak, termasuk tindakan afirmasi bagi anak dalam	Banyak anak yang belum memperoleh hak-haknya.	Angka kekerasan tinggi Jumlah	Jumlah LSM anak cukup memadai

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra KPPA	Permasalahan Pelayanan Dinas PPPAP2KB	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	kondisi khusus		pernikahan dini meningkat.	
3	Meningkatnya perlindungan anak	Tingginya kekerasan terhadap anak.	Rendahnya pedulian orang tua dan publik dalam perlindungan anak	Cepatnya arus informasi yang mampu menjembatani kebutuhan warga.
		Tingginya pernikahan dini	Rendahnya pedulian orang tua dan publik dalam perlindungan anak	Cepatnya arus informasi yang mampu menjembatani kebutuhan warga.
4	Meningkatnya koordinasi bantuan hukum dan hubungan masyarakat	Belum optimalnya bantuan hukum diimplementasikan	Jumlah dana terbatas, covernya banyak	Bantuan hukum dari berbagai pihak terbuka luas.
5	Meningkatnya koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan program dan anggaran	Belum berkembangnya koordinasi PPRG	Kepedulian SKPD rendah terhadap PPRG	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana selalu setiap tahun menyelenggarakan peningkatan kapasitas
6	Meningkatnya kelembagaan data terpilah dan data anak	Belum tersusunnya sistem data gender dan anak.	Data SKPD lemah	Sudah dibuat sistem data pilah
7	Meningkatkan pengembangan SDM, administrasi dan pengelolaan penunjang pelaksana tugas Kemen PPPA.	Rendahnya kualitas SDM	Tidak banyak yang tertarik untuk belajar lanjut	Informasi beasiswa terbuka
8	Meningkatnya pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur Kemen PPPA	Capaian kinerja belum optimal	Mekanisme pemeriksaan PPRG belum optimal	Kecepatan dalam penyusunan laporan
9	Meningkatnya telaahan	Belum efektifnya	Banyak	PPRG mulai

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra KPPA	Permasalahan Pelayanan Dinas PPPAP2KB	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, dan Program Perlindungan anak.	program dan kegiatan responsif gender	internal Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana kurang peduli kemampuan diri.	digalakkan

D. Telaah Renstra Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)

Sesuai dengan arah kebijakan Pemerintah (Kabinet Kerja) 2015-2019, seluruh Kementerian/Lembaga diarahkan untuk turut serta mensukseskan Visi dan Misi Pembangunan 2015-2019. Visi dan Misi Pembangunan tersebut di dukung oleh 9 (sembilan) Agenda Prioritas Pembangunan (Nawa Cita), BKKBN diharapkan dapat berpartisipasi dalam mensukseskan Agenda Prioritas ke 5 (lima), untuk “Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia”, yaitu :

- 1) **Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana**
- 2) Pembangunan Pendidikan khususnya Pelaksanaan Program Indonesia Pintar
- 3) Pembangunan Kesehatan khususnya Pelaksanaan Program Indonesia Sehat
- 4) Peningkatan kesejahteraan rakyat marjinal melalui pelaksanaan program Indonesia Kerja

Terkait dengan upaya pencapaian visi nasional, BKKBN memiliki visi untuk menjadi **Lembaga yang handal dan dipercaya dalam mewujudkan Penduduk Tumbuh Seimbang dan Keluarga Berkualitas**”. Untuk pencapaian visi tersebut dijabarkan misi sebagai berikut:

1. Mengarusutamakan Pembangunan Berwawasan Kependudukan;
2. Menyelenggarakan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi;
3. Memfasilitasi Pembangunan Keluarga;
4. Membangun dan menerapkan Budaya Kerja Organisasi secara konsisten;

5. Mengembangkan jejaring Kemitraan dalam pengelolaan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga.

Sasaran strategis yang ingin dicapai oleh BKKBN dalam rangka mendukung visi nasional adalah:

1. Menurunnya Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)
2. Menurunnya Angka kelahiran total (TFR) per WUS (15 - 49 tahun)
3. Meningkatnya pemakaian kontrasepsi (CPR)
4. Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)
5. Menurunnya Angka kelahiran pada remaja usia 15 -19 tahun (ASFR 15 – 19 tahun)
6. Menurunnya kehamilan yang tidak diinginkan dari WUS (15 – 49 tahun).

Tabel 3.3.
Indikator Sasaran Strategis BKKBN Tahun 2015-2019

No	Indikator	2015	2016	2017	2018	2019	2015-2019
1.	Persetase Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	1,38 (2010-2015)	1,27	1,25	1,23	1,21	1,19 (2015-2020)
2.	Angka kelahiran total (TFR) per WUS (15 - 49 tahun)	2,37	2,36	2,33	2,31	2,28	2,28
3.	pemakaian kontrasepsi (CPR)	65,2	65,4	65,6	65,8	66,0	66,0
	a. Menurunnya tingkat putus pakai kontrasepsi	26,0	25,7	25,3	25,0	24,6	24,6
	b. Meningkatnya penggunaan MKIP (%)	20,5	21,1	21,7	22,3	23,5	23,5
4.	Persentase Kebutuhan Ber KB yang tidak terpenuhi (Unmet need) (%)	10,60	10,48	10,26	10,14	9,91	9,91
5.	Angka kelahiran pada remaja usia 15 -19 tahun (ASFR 15 – 19 tahun)	46	44	42	40	38	38
6.	Persentase	7,1	7,0	6,9	6,8	6,6	6,6

No	Indikator	2015	2016	2017	2018	2019	2015-2019
	kehamilan yang tidak diinginkan dari WUS (15 – 49 tahun).						

Sumber: Renstra BKKBN Tahun 2015-2019

Tabel 3.4.

Permasalahan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Terhadap Pencapaian Sasaran Strategis BKKBN beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

Tujuan dan Sasaran	Permasalahan Pelayanan Dinas PPPAP2KB	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
1. Menurunnya Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	<ul style="list-style-type: none"> Belum optimalnya pelaksanaan program Keluarga Berencana, dilihat dari masih rendahnya cakupan peserta KB aktif Belum optimalnya kegiatan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi hak-hak dan kesehatan reproduksi 	Masih rendahnya kesadaran kaum pria untuk berperan serta secara aktif dalam program KB sebagai akseptor KB	Kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi mengalami peningkatan
2. Menurunnya Angka kelahiran total (TFR) per WUS (15 - 49 tahun)	Belum optimalnya pelaksanaan program Keluarga Berencana, dilihat dari masih rendahnya cakupan peserta KB aktif	Banyaknya PUS yang tidak ikut ber-KB	Sosialisasi program Keluarga Berencana selalu dilaksanakan
3. Meningkatnya pemakaian kontrasepsi (CPR)	Belum optimalnya kemampuan penyediaan alat kontrasepsi.	Kemampuan daerah untuk menyediakan alat kontrasepsi terbatas	Ada dana alokasi khusus dari pemerintah pusat untuk program KB
4. Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Masih tingginya angka unmet need KB.	Banyaknya PUS yang tidak ikut ber-KB	Sosialisasi program Keluarga Berencana selalu dilaksanakan
5. Menurunnya Angka kelahiran pada remaja usia 15 -19 tahun (ASFR 15 – 19)	Masih banyaknya Jumlah PUS yang isterinya dibawah usia 20 tahun	Belum optimalnya peran PIK R dalam	Seluruh kecamatan telah memiliki fasilitas pelayanan konseling remaja

Tujuan dan Sasaran	Permasalahan Pelayanan Dinas PPPAP2KB	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
tahun) 6. Menurunnya kehamilan yang tidak diinginkan dari WUS (15 – 49 tahun).		melakukan kegiatan dan penyuluhan konseling	

E. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepri selama 5 tahun yang akan datang tidak merencanakan kegiatan pembangunan fisik, sehingga aktivitas program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tidak akan berpengaruh terhadap perencanaan tata ruang dan juga tidak menimbulkan dampak terhadap aspek lingkungan hidup.

F. Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan pada rumusan permasalahan pada sub bab A, selanjutnya dilakukan analisis dengan metode penilaian atau skoring sebagai berikut ini :

Tabel 3.5.
Penentuan Isu Strategis melalui Metode Penilaian atau Skoring

Permasalahan	Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran Renstra	Merupakan tugas dan tanggung jawab SKPD sesuai tupoksi	Memiliki dampak yang besar terhadap publik	Memiliki daya ungkit terhadap pembangunan daerah	Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani	Prioritas janji politik (kepala daerah) yang perlu diwujudkan	Jumlah	Ranking
	20	10	20	10	15	25		
Rendahnya kualitas dan kuantitas SDM dalam menjalankan tupoksi, lemahnya koordinasi antar bagian, serta penempatan SDM yang kurang sesuai dengan keahliannya.	18	8	18	9	15	20	88	1
Sarana dan prasarana yang masih belum memadai	9	5	12	6	15	20	67	6
Belum tersedianya basis data akurat responsif gender dan	15	10	18	9	15	18	85	2

Permasalahan	Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran Renstra	Merupakan tugas dan tanggung jawab SKPD sesuai tupoksi	Memiliki dampak yang besar terhadap publik	Memiliki daya ungkit terhadap pembangunan daerah	Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani	Prioritas janji politik (kepala daerah) yang perlu diwujudkan	Jumlah	Ranking
	20	10	20	10	15	25		
anak yang digunakan dalam perencanaan penganggaran.								
Aksesibilitas perempuan dalam pengelolaan sumberdaya ekonomi terbatas.	12	7	16	9	4	20	68	5
Rendahnya kontribusi pendapatan perempuan	13	5	16	9	6	18	67	6
Belum optimalnya jejaring lembaga pengelola keberdayaan perempuan dan anak.	9	5	16	6	12	12	60	8
Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	18	9	16	8	4	18	73	3
Kepri menjadi daerah tujuan dan transit korban tindak	18	9	16	5	4	18	70	4

Permasalahan	Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran Renstra	Merupakan tugas dan tanggung jawab SKPD sesuai tupoksi	Memiliki dampak yang besar terhadap publik	Memiliki daya ungkit terhadap pembangunan daerah	Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani	Prioritas janji politik (kepala daerah) yang perlu diwujudkan	Jumlah	Ranking
	20	10	20	10	15	25		
kekerasan dan perdagangan orang dari seluruh wilayah Indonesia								
Tingkat perceraian tinggi	12	4	16	3	7	12	54	10
Luasnya coverage area dalam pengendalian perdagangan orang melalui pelabuhan-pelabuhan rakyat termasuk pelabuhan resmi.	6	8	16	8	4	12	54	10
Pemenuhan hak-hak anak belum optimal	16	8	16	8	7	12	67	6
Menurunnya ketahanan keluarga dalam menciptakan keluarga sejahtera dan harmonis.	16	6	12	6	7	12	59	9

Permasalahan	Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran Renstra	Merupakan tugas dan tanggung jawab SKPD sesuai tupoksi	Memiliki dampak yang besar terhadap publik	Memiliki daya ungkit terhadap pembangunan daerah	Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani	Prioritas janji politik (kepala daerah) yang perlu diwujudkan	Jumlah	Ranking
	20	10	20	10	15	25		
Meningkatnya pernikahan dini dan pernikahan anak yang tidak diinginkan.	16	8	12	8	4	12	60	8
Belum optimalnya perlindungan khusus bagi anak-anak.	16	9	12	6	4	12	59	9
Kesenjangan gender dalam pembangunan daerah masih tinggi	18	9	16	8	7	12	70	4
Rendahnya motivasi dan partisipasi perempuan dalam mengembangkan potensi dan berkiprah dalam ranah publik khususnya dalam bidang ekonomi, politik, sosial dan hukum	12	6	12	6	4	12	52	11
Rendahnya kontribusi	16	8	15	8	7	12	66	7

Permasalahan	Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran Renstra	Merupakan tugas dan tanggung jawab SKPD sesuai tupoksi	Memiliki dampak yang besar terhadap publik	Memiliki daya ungkit terhadap pembangunan daerah	Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani	Prioritas janji politik (kepala daerah) yang perlu diwujudkan	Jumlah	Ranking
	20	10	20	10	15	25		
dunia usaha/swasta dalam penerapan PUG , dan pemenuhan hak anak.								
Terbatasnya lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan dan anak.	16	8	15	8	7	12	66	7
Penerapan sanksi terhadap regulasi perlindungan perempuan dan anak belum optimal.	12	5	10	6	4	12	49	12
Belum optimalnya kegiatan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi hak-hak dan kesehatan reproduksi	12	5	10	6	4	12	49	12

Permasalahan	Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran Renstra	Merupakan tugas dan tanggung jawab SKPD sesuai tupoksi	Memiliki dampak yang besar terhadap publik	Memiliki daya ungkit terhadap pembangunan daerah	Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani	Prioritas janji politik (kepala daerah) yang perlu diwujudkan	Jumlah	Ranking
	20	10	20	10	15	25		
Masih bervariasinya kelembagaan sebagai wujud dukungan Pemerintah Kabupaten/Kota terhadap program Kependudukan dan Keluarga Berencana (belum adanya kabupaten kota yang membentuk BKKBD)	12	6	12	6	4	12	52	11
Ratio jumlah Penyuluh KB terhadap jumlah Desa/Kelurahan di Kepulauan Riau yang belum ada. Kepulauan Riau memiliki 351 Desa/Kelurahan sedangkan jumlah PLKB/PKB sebanyak 547 yang berarti setiap	12	6	12	6	4	12	52	11

Permasalahan	Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran Renstra	Merupakan tugas dan tanggung jawab SKPD sesuai tupoksi	Memiliki dampak yang besar terhadap publik	Memiliki daya ungkit terhadap pembangunan daerah	Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani	Prioritas janji politik (kepala daerah) yang perlu diwujudkan	Jumlah	Ranking
	20	10	20	10	15	25		
petugas lapangan KB rata-rata membina 4 Desa/Kelurahan.								
Belum sinergisnya penyerasian kebijakan-kebijakan dibidang pengendalian penduduk yang ditandai masih belum konsistennya secara vertikal maupun horizontal kebijakan kependudukan terkait dengan kuantitas, kualitas dan mobilitas penduduk. Ini ditandai pula adanya kebijakan yang kurang mendukung upaya pengendalian kuantitas atau jumlah penduduk	12	6	12	6	4	12	52	11

Permasalahan	Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran Renstra	Merupakan tugas dan tanggung jawab SKPD sesuai tupoksi	Memiliki dampak yang besar terhadap publik	Memiliki daya ungkit terhadap pembangunan daerah	Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani	Prioritas janji politik (kepala daerah) yang perlu diwujudkan	Jumlah	Ranking
	20	10	20	10	15	25		
Belum optimalnya pelaksanaan program Keluarga Berencana, dilihat dari masih rendahnya cakupan peserta KB aktif	18	9	16	8	4	18	73	3
Tingginya migrasi penduduk.	16	9	12	6	4	12	59	9
Belum optimalnya kemampuan penyediaan alat kontrasepsi.	12	7	16	9	4	20	68	5
Masih tingginya angka unmetneed KB.	18	9	16	8	4	18	73	3
Masih banyaknya Jumlah PUS yang isterinya dibawah usia 20 tahun	18	9	16	5	4	18	70	4

Hasil penilaian atau skoring isu strategis yang harus ditangani oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Rendahnya kualitas dan kuantitas SDM dalam menjalankan tupoksi, lemahnya koordinasi antar bagian, penempatan SDM yang kurang sesuai dengan keahliannya serta sarana dan prasarana yang masih belum memadai
2. Belum tersedianya basis data akurat responsif gender dan anak yang digunakan dalam perencanaan penganggaran.
3. Rendahnya kapasitas, ketrampilan dan pendapatan perempuan dalam menopang kesejahteraan keluarga.
4. Belum optimalnya jejaring lembaga pengelola pemberdayaan perempuan dan anak.
5. Tingginya kekerasan terhadap perempuan dan anak, termasuk pernikahan dini, perdagangan orang, kerentanan anak berkebutuhan khusus dan lemahnya ketahanan keluarga.
6. Kesenjangan gender dalam pembangunan daerah antar Kabupaten/Kota masih tinggi
7. Rendahnya partisipasi dunia usaha/swasta dalam penerapan PUG, dan pemenuhan hak anak.
8. Masih rendahnya cakupan peserta KB aktif
9. Belum optimalnya kemampuan penyediaan alat kontrasepsi.
10. Masih tingginya angka unmetneed KB
11. Masih banyaknya Jumlah PUS yang isterinya dibawah usia 20 tahun